

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) OLEH PEMERINTAH DESA KARANGMULYA KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

Abdul Kholiq

Universitas Galuh Ciamis
E-mail : abdulholiq8000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, terlihat dari: sarana dan prasarana yang belum merata, serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan (literatur/dokumentasi), dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Hasil penelitian tentang Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) belum optimal jika diukur dari teori 4 variabel yang menentukan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya hambatan-hambatan, yaitu: sarana prasarana dan penyuluhan yang belum merata, kualitas SDM belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, kurang lengkapnya pelaporan program, kurang optimalnya pelaksanaan program, kurangnya kontribusi swadaya masyarakat, penyampaian informasi yang masih belum konsisten. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan yaitu: mengadakan promosi kesehatan, melakukan pemantauan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul, melakukan evaluasi rangkaian kegiatan, melakukan pelaporan, penyajian data dan informasi secara tepat dan akurat, mengadakan kegiatan pelatihan bagi pengurus program, menyediakan (LIP) Layanan Informasi dan Pengaduan untuk menampung dan memfasilitasi pertanyaan, saran, dan kritik.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, Pamsimas.*

PENDAHULUAN

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi problem hingga saat ini. Karena itulah, pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum, dan

sanitasi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya penyediaan air dan sanitasi untuk kelancaran aktivitas masyarakat, maka peningkatan kebutuhan terhadap penyediaan air bersih perlu di tindaklanjuti dengan menyediakan

layanan penyediaan air bersih baik itu dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum dan sanitasi, dimana sampai akhir tahun 2019 sudah mencapai 89,27% untuk akses air minum layak dan 77,44% untuk akses sanitasi layak (BPS, 2019).

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program PAMSIMAS berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sementara pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa

Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ketentuannya tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.174/KPTS/DC/2020 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2021 Tahap I.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran terlihat bahwa implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana air bersih & sanitasi yang belum merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses yang layak terhadap layanan PAMSIMAS.
2. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan program PAMSIMAS kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program tersebut dan berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?".

Kemudian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (Suparno, 2017:15) implementasi didefinisikan sebagai berikut:

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi."

Adapun Gaffar (Sumpeno, 2020:78) mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas.

2. Kebijakan Publik

Ahli kebijakan Anderson (Suparno, 2017:7) merumuskan bahwa:

„Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.”

Adapun menurut Chandler dan Plano (Suparno, 2017:9), kebijakan publik (*public policy*) adalah

„Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Dunn (Suparno, 2017:9) menyatakan bahwa kebijakan publik meliputi beberapa hal, misalnya:

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
5. Keluaran (*output*), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.
6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y.
7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang.

Dari beberapa pengertian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia

saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan menurut Jones (Suparno,2017:15) adalah :

„Kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.“ Jadi dalam kaitannya dengan suatu kebijakan publik, disini adanya upaya membentuk *linkage* (kaitan) antara tindakan program dengan tujuan/sasaran program yang hendak dicapai.

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Edward III (Agustino, 2017:136-141) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017:133) menjelaskan bahwa:

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat

utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Menurut Suliha (Nurmala, 2018:63):

Dalam implementasi kebijakan penyuluhan dilakukan menggunakan prinsip belajar sehingga masyarakat Mendapatkan perubahan pengetahuan dan kemauan, baik untuk mencapai kondisi hidup yang diinginkan ataupun untuk mendapatkan cara mencapai kondisi tersebut, secara individu maupun bersama-sama.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber

daya yang tersedia. Maka dari itu seharusnya kita dapat memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan dan memanfaatkannya, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, waktu, finansial, maupun sarana yang merupakan sumber daya penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017:133) mengemukakan bahwa:

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan

proses implementasi.

Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Grindle (Agustino, 2017:143) menjelaskan bahwa „pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik“.

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' juga menjadi faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:151) menjelaskan:

Komitmen merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh personal yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi untuk menjalankan tugasnya, menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil sebagaimana mestinya.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Mazmanian & Paul A. Sabatier (Agustino, 2017:146) berpendapat bahwa:

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut

proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Edward III (Agustino, 2017: 141) menjelaskan bahwa:

Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Oleh karena Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

4. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS, merupakan *platform* pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam rangka

menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat artinya Program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri-urban. Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa Karangmulya, Sekretaris Desa Karangmulya, Ketua Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), Anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), dan masyarakat Desa Karangmulya. Adapun dalam proses pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, penulis membatasi berdasarkan fokus kajian, yang disusun merujuk pada

4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III (Agustino, 2017:136-141) yaitu “(1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat diketahui bahwa secara umum belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dilihat dari:

1. Komunikasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Pemerintah desa dapat menjamin komunikasi yang baik dalam menjalankan program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sudah dilakukan dengan baik. Yang mana bentuk komunikasi itu ditunjukkan dengan adanya sosialisasi atau

pertemuan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti KPSPAMS, KKM, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, hingga masyarakat sasaran itu sendiri. Adapun berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa proses komunikasi untuk sehari-harinya biasanya dilakukan dengan melakukan pertemuan dan juga menggunakan media komunikasi elektronik.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017:133) bahwa:

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan program sudah dilaksanakan dengan baik.

b) Pemerintah desa melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pemahaman tentang program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat sudah berjalan tetapi belum menjangkau banyak masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, hal ini sejalan dengan prinsip pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang lebih membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pembangunan. Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan sebagai pemicuan dan support program dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Suliha (Nurmala, 2018:63) mengemukakan bahwa:

Penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan prinsip belajar sehingga masyarakat mendapatkan perubahan pengetahuan dan kemauan, baik untuk mencapai kondisi hidup yang diinginkan ataupun untuk mendapatkan cara mencapai kondisi tersebut, secara individu maupun bersama-sama.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman tentang program Pamsimas kepada masyarakat sudah dilaksanakan tetapi belum optimal.

2. Sumber Daya, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Adanya sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan program Pamsimas terdiri dari SDM,

SDA, dan sumber dananya. Adapun berdasarkan hasil observasi bahwa sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan program Pamsimas sudah ada, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan walaupun masih terdapat kekurangan di tingkat partisipasi masyarakatnya.

Van Metter & Van Horn (Agustino, 2017:133) mengemukakan bahwa:

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya sudah mencukupi dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas walaupun hasil dari observasi menunjukkan bahwa untuk SDM di tingkat masyarakat tingkat partisipasinya masih belum optimal.

b) Adanya fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan program Pamsimas sudah ada dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adapun berdasarkan observasi diketahui bahwa fasilitas

pendukung dalam pelaksanaan program Pamsimas sudah ada walaupun dalam pembangunannya belum merata.

Grindle (Agustino, 2017:143) mengemukakan bahwa 'pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik'.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi program Pamsimas sudah ada dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat walaupun belum optimal.

3. Disposisi, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Pemerintah desa dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam melaksanakan program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepercayaan pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat dalam menjalankan program Pamsimas dapat dikatakan sudah ada. Yang mana hal itu ditunjukkan dengan adanya loyalitas dan tanggung jawab pemerintah desa, dibuktikan dengan program Pamsimas yang sudah berjalan. Adapun berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa kepercayaan pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat telah dilakukan dalam bentuk pengabdian diri terhadap pelaksanaan program Pamsimas.

Sejalan dengan uraian di atas,

Tachjan (2006:15) mengemukakan bahwa:

kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam menjalankan program Pamsimas terlihat dari adanya loyalitas, tanggung jawab, terlaksanakannya program serta pengabdian diri terhadap pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

b) Adanya komitmen yang jelas dari pemerintah desa untuk melaksanakan program PAMSIMAS dengan optimal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komitmen yang jelas dari pemerintah desa untuk melaksanakan program PAMSIMAS dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Yang mana komitmen tersebut ditunjukkan dengan terlaksanakannya program. Adapun berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa komitmen yang jelas dari pemerintah desa untuk melaksanakan program PAMSIMAS dengan optimal memang sudah ada, hal ini ditunjukkan dengan terlaksanakannya program Pamsimas, pembangunan sarana dan prasarana, transparansi program, serta

tercapainya program sampai ke penerima manfaat.

Sejalan dengan uraian di atas, Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:151) mengemukakan bahwa:

Komitmen merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh personal yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi untuk menjalankan tugasnya, menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil sebagaimana mestinya.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dilakukan pemerintah desa sudah dipandang cakup dan cukup jelas dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan program Pamsimas.

4. Struktur Birokrasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Adanya *standar operating procedures (SOPs)* yang jelas dalam pelaksanaan program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *standar operating procedures (SOPs)* yang jelas dalam pelaksanaan program Pamsimas sudah ada. Yang mana standar operating procedures (SOPs) tersebut ditunjukkan dengan adanya Buku Pedoman dan prosedur yang menjadi panduan dalam

pelaksanaan program Pamsimas. Adapun berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa *Standar Operating Procedures (SOPs)* dalam pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sudah ada dan jelas. Tinggal bagaimana pelaksana memahami dan melaksanakannya secara optimal.

Mazmanian & Paul A. Sabatier (Agustino, 2017:146) mengemukakan bahwa:

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures (SOPs)* dalam pelaksanaan program Pamsimas sudah dituangkan dalam buku Pedoman Umum sebagai panduan dalam penyelenggaraan program agar dapat berjalan dengan efektif, baik di tingkat pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, serta Prosedur Operasional Baku (POB) yang merupakan acuan atau petunjuk praktis dalam merencanakan berbagai sub

kegiatan dari Program Pamsimas.

b) Adanya pembagian tugas dan fungsi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembagian tugas dan fungsi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan sudah dilakukan dengan baik. Yang mana pembagian itu ditunjukkan dengan adanya kegiatan pemilihan utusan pengurus dan pembagian tugas, serta kegiatan pelatihan bagi pengurus Pamsimas itu sendiri. Adapun berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa pembagian tugas dan fungsi dalam program Pamsimas di Desa Karangmulya terdiri dari Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab, Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), Unit Satlak, Tim Pengadaan barang dan jasa, serta masyarakat itu sendiri.

Edward III (Agustino, 2017: 141) berpendapat bahwa:

Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan fungsi sudah ditentukan melalui pemilihan utusan, selain itu juga dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi para pengurus yang sudah ditetapkan sehingga dalam

menjalankan programnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan.

2. Hambatan-Hambatan dan Upaya-Upaya dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

- a) Pemerintah Desa belum secara merata melakukan penyuluhan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung tentang program Pamsimas. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul maka dilakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, serta menguatkan peran pengurus dan masyarakat untuk berperan aktif sebagai mitra pemerintah desa.
- b) Belum meratanya sarana dan prasarana sanitasi di masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangmulya yaitu dengan melakukan pemantauan, mengantisipasi dan evaluasi membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
- c) kualitas sumber daya manusia yang masih kurang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.

Selanjutnya upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangmulya melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus program seperti pelatihan teknik sistem penyediaan air minum dan sanitasi, pelatihan administrasi keuangan, dan pelatihan promosi kesehatan.

- d) Kurang lengkapnya pelaporan program di dalam Sistem Informasi Manajemen Pamsimas. Selanjutnya upaya yang dilakukan Pemerintah Desa melakukan pelaporan, penyajian data dan informasi secara tepat dan akurat yang merupakan bagian penting dari pemantauan dan evaluasi yang memuat hasil pelaksanaan program secara berjenjang.
- e) Kurang optimalnya pelaksanaan program Pamsimas. Selanjutnya upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangmulya yaitu dengan menyediakan Layanan Informasi dan Pengaduan untuk menampung dan memfasilitasi penanganan informasi, pertanyaan, saran, kritik atau pengaduan berupa permasalahan dan layanan yang terjadi terkait pelaksanaan Program Pamsimas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Oleh Pemerintah Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang

Kabupaten Pangandaran belum optimal berdasarkan 4 dimensi yang dijadikan tolak ukur, diantaranya 2 dimensi sudah berjalan dengan baik dan 2 dimensi lainnya belum sesuai dalam pelaksanaannya. Selanjutnya hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu, (1) Belum meratanya penyuluhan terkait pemahaman program Pamsimas kepada masyarakat, (2) Belum meratanya sarana dan prasarana sanitasi, (3) Kualitas SDM belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, (4) Kurang lengkapnya pelaporan program di dalam Sistem Informasi Manajemen Pamsimas, (5) Kurang optimalnya pelaksanaan program Pamsimas. Kemudian upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu, (1) Mengadakan kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat, (2) Melakukan pemantauan, mengantisipasi dan evaluasi membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar, (3) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus program, (4) Melakukan pelaporan, penyajian data dan informasi secara tepat dan akurat, (5) menyediakan Layanan Informasi dan Pengaduan untuk menampung dan memfasilitasi penanganan informasi, pertanyaan, saran, dan kritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nurmala, Ira, et al. 2018. *Promosi Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumpeno, Triyono. 2020. "Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7. 76-99.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.